

**STRATEGI UPT PANGKALAN PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
(PSDKP) DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL
FISHING DI KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI



Oleh:

Ester Rusadi Nababan

141010044

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

**STRATEGI UPT PANGKALAN PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
(PSDKP) DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL
FISHING DI KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**



**Oleh:
Ester Rusadi Nababan
141010044**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain. Dan skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan didalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 03 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,



Ester Rusadi Nababan
141010044

**STRATEGI UPT PANGKALAN PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
(PSDKP) DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL
FISHING DI KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh:
Ester Rusadi Nababan
141010044**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 03 Agustus 2018



Riko Riyanda, S.IP., M.Si

Pembimbing

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan strategi UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan dalam menanggulangi *illegal fishing* di Kepulauan Riau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan Kepada Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, Kepala Seksi Pengawasan Dan Penanganan Pelanggaran serta Kanit I Tindak Subbid Gakkum, serta masyarakat nelayan yang ada di Kota Batam. Penelitian ini di analisis dengan metode analisis Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT) dengan memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis SWOT strategi yang digunakan UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan adalah: (A) Strategi Strength-Opportunity SO yaitu meningkatkan semangat pegawai PSDKP dalam menanggulangi *illegal fishing* serta Meningkatkan sinergitas antar penegak hukum dalam menanggulangi *illegal fishing*. (B) Strategi Strength-Threat ST yaitu meningkatkan aparat penegak hukum dan meningkatkan patrol laut. (C) Strategi Weakness-Opportunity WO yaitu sarana dan prasarana serta meningkatkan kerja sama antara aparat penegak hukum melakukan tindakan tegas aparat penegak hukum kepada kapal asing. (D) Strategi Weakness-Threat WT yaitu meningkatkan penguatan dari sisi kelembagaan sumber daya manusia serta meningkatkan teknologi yang canggih dalam menanggulangi *illegal fishing*.

Kata Kunci: Strategi, Illegal Fishing, SWOT

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the strategy of UPT Marine Resources and Fishery Resource Base in tackling illegal fishing in Riau Islands. This research uses descriptive research method with qualitative approach. Data collection techniques are done through observation, interviews, and documents. Interview conducted To Head of Supervision Base of Marine And Fishery Resources, Section Head of Supervision And Handling of Violation and Kanit I of Subbid Gakkum Act, and fisherman society in Batam City. This research is analyzed by analysis method of Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT) with attention to internal factor and external factor. Based on the results of the research using SWOT analysis strategy used UPT Marine and Fisheries Resources Supervision Base are: (A) Strenght-Opportunity SO Strategy that is to improve the spirit of PSDKP employees in tackling illegal fishing and Increase synergy among law enforcement in tackling illegal fishing. (B) The Strenght-Threat ST strategy is to increase law enforcement officers and improve marine patrols. (C) Weakness-Opportunity WO Strategy is the means and infrastructure and to increase cooperation between law enforcement officers to take firm action against law enforcement officers to foreign ships. (D) Weakness-Threat WT strategy is to increase the strengthening of the institutional side of human resources and improve sophisticated technology in tackling illegal fishing.

Keywords: *Strategy, Illegal Fishing, SWOT*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena itu kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Bobby Mandala Putra, S.IP., M.SI., selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara di Universitas Putera Batam, sekaligus Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulis menuntut ilmu di Universitas Putera Batam.
3. Bapak Riko Riyanda, S.IP., M.Si., selaku Pembimbing Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara yang telah banyak membimbing penulis serta memberikan arahan sampai selesai skripsi ini.
4. Bapak Slamet, S.Pi selaku kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kota Batam.

5. Bapak Muhamad Syamsu Rokhman, S.Pi., selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di PSDKP Batam, serta Bapak Salim selaku Bagian Penyidik Perikanan di Kota Batam.
6. Bapak Muslani, S.St.Pi., M.H., selaku kepala subbagian tata usaha yang telah banyak membantu peneliti melakukan penelitian di PSDKP Batam, serta bapak Martin Yeremias Luhulima, S.H, M.Si., sebagai kepala seksi sarana dan prasarana.
7. Bapak Benyamin Sapta T., S.I.K, M.Si., selaku Direktur polisi air dan udara polda kepri yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara.
8. Bapak Ahmad Wahyudi, S.H., M.H., selaku Kanit I Tindak Subbid Gakkum, serta Bapak Untung Nainggolan selaku Ba Sespri yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian di Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara.
9. Kedua orang tua saya Alm. Tohom Nababan dan Ruslan Meryanti Lumbantoruan yang banyak memberikan dukungan baik moril maupun materil, serta kakak-kakak dan adik-adik saya yang memberikan dukungan kepada penulis.
10. Semua Teman-teman Prodi Administrasi Negara angkatan 2014 di Universitas Putera Batam, khususnya untuk Hildayani Simanjuntak, Permata Sari, Mika Rojayanti, Desy Kristina Manurung, Rugun Josepita

Manalu serta Suriana Siregar yang telah banyak memberikan dukungan dan membantu saya.

11. Masyarakat Nelayan yang telah membantu penulis Melakukan Wawancara di pulau akar jembatan II.
12. Perpustakaan BP Batam yang telah membantu penulis dalam mencari referensi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan demikian penulis mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga amal dan kebajikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa, amin.

Batam, 03 Agustus 2018



Ester Rusadi Nababan

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Teori Strategi.....	10
2.2 Pengertian Illegal Fishing.....	12
2.3 Analisis SWOT.....	17
2.4 Penelitian Terdahulu.....	22
2.5 Kerangka Pemikiran.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Fokus Penelitian.....	27
3.3 Sumber Data.....	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	28

3.5 Metode Analisis Data.....	29
3.6 Keabsahan Data	31
3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	37
4.1.1 Gambaran Umum Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)	37
4.1.2 Tugas dan Fungsi.....	35
4.1.3 Tujuan	36
4.1.4 Wilayah Kerja.....	37
4.1.5 Struktur Organisasi	38
4.1.6 Sumber Daya	39
4.1.7 Sarana dan Prasarana	40
4.1.8 Strategi UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.....	40
4.1.9 Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung dari Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)	49
4.2 Pembahasan	
4.2.1 Strategi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Di Kepulauan Riau.....	52
4.2.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	26
Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data (Interactive Model)	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah kasus <i>illegal fishing</i> di Kepulauan Riau	4
Tabel 1.2 Data Jumlah ABK Negara asing yang tertangkap.....	5
Tabel 2.1 Matrik Analisis SWOT untuk Perumusan Strategi	22
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	33
Tabel 4.1 Rincian Personil lingkup Pangkalan PSDKP.....	42
Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana	43
Tabel 4.3 Faktor-Faktor Internal dan Eksternal dalam Analisis SWOT.....	57
Tabel 4.4 Matrik SWOT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.....	58

DAFTAR SINGKATAN

1. PSDKP : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2. POKMASWAS : Kelompok Masyarakat Pengawas
3. UPT : Unit Pelaksana Teknis
4. Satwas : Satuan Pengawas
5. KIA : Kapal Ikan Asing
6. Strategi SO : Strategi *Strenght Opportunity*
7. Strategi WO : Strategi *Weakness Opportunity*
8. Strategi ST : Strategi *Strength Threat*
9. Strategi WT : Strategi *Weakness Threat*
10. SWOT : *Strenght Weakness Opportunity Threat*
11. ABK : Anak Buah Kapal

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I PEDOMAN WAWANCARA
LAMPIRAN II DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN III SURAT KETERANGAN PENELITIAN
LAMPIRAN IV DOKUMENTASI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara kepulauan, wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil, dan hampir dua pertiga wilayah Indonesia merupakan laut. Kondisi geografis Indonesia yang demikian, membuat Indonesia harus turut aktif dalam forum internasional di bidang hukum laut, hal ini menyangkut kepentingan Indonesia baik politik, sosial, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Sebagai bangsa yang tinggal dan hidup pada wilayah yang sebagian besar terdiri dari wilayah laut, Bangsa Indonesia perlu mengembangkan konsep geopolitik dan geostrategi sebagaimana yang tertuang dalam wawasan nusantara yang memandang seluruh wilayah daratan, lautan, dan udara di atasnya. Segenap penduduk serta seluruh sumber daya yang terkandung di dalamnya sebagai sesuatu yang terpadu. Laut memberikan peluang dan keuntungan yang besar bagi bangsa Indonesia dalam upaya memanfaatkan dan mendayagunakan secara optimal sumber daya alam di laut untuk pembangunan nasional Indonesia (Aida, 2012: 1).

Indonesia adalah negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, Australia dan India. Oleh karena itu, Indonesia harus

mempunyai konsep pengelolaan perbatasan. Hal ini dikarenakan, perbatasan internasional memiliki konsekuensi politis. Salah satu permasalahan yang kerap terjadi di wilayah perbatasan adalah terjadinya praktik-praktik *Illegal Fishing*. Kompleksnya permasalahan *Illegal Fishing* di wilayah perbatasan, maka diperlukan kebijakan alternatif selain penempatan militer, dan juga untuk memberdayakan nelayan yang ada, diharapkan dengan didirikannya Pangkalan di wilayah perbatasan dapat mengurangi kegiatan pelanggaran perbatasan kawasan perairan oleh kapal-kapal nelayan dari negara lain. (Solihin, Imron, & Wahyono, 2012: 205)

Seharusnya sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu sektor penting dalam memberikan kontribusi pembangunan nasional, baik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama nelayan dan petani ikan maupun dalam rangka pemasukan devisa Negara. Namun, kenyataan tidak demikian. Sektor kelautan dan perikanan belum menunjukkan sesuatu yang membanggakan terkait dengan pembangunan nasional. Bahkan realitas yang terjadi sangat bertolak belakang karena nelayan dan petani ikan di Indonesia merupakan elemen terpenting dalam sektor ini bahkan mereka pula tergolong sebagai kelompok sosial termiskin di Indonesia. Terdapat kurang lebih 9.261 desa pesisir atau desa pantai yang merupakan kantong-kantong kemiskinan (Kordi K, 2015: vii).

Kerugian Negara akibat penangkapan ikan secara liar (*illegal fishing*) oleh kapal-kapal penangkap ikan nelayan asing dikhawatirkan kian meningkat sejalan dengan semakin banyaknya kasus-kasus pelanggaran bidang perikanan. Menurut data pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan pada

tahun 2005 jumlah pelanggaran yang ditangani DKP 174 kasus tahun 2006 naik menjadi 216 kasus hingga September 2007 sudah ada 160 kapal ikan liar yang diproses secara hukum. Selama tahun 2010-2014, kapal pengawas perikanan telah berhasil memeriksa 14.951 kapal perikanan, dan menangkap 492 kapal perikanan yang diduga pelaku *illegal fishing*. Kasus tersebut terus meningkat dari tahun ketahun karena penanganan belum menyentuh pada akar masalahnya (Mahmudah, 2015:2-3).

Dalam peraturan perundang-undangan tentang kelautan, terutama menyangkut bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran”. Namun, baik dalam tindak kejahatan maupun pelanggaran tidak terdapat istilah *illegal fishing*. Istilah ini terdapat dalam penjelasan undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan memiliki serangkaian payung hukum terkait penegakan hukum terhadap tindakan *illegal fishing*, salah satunya adalah dimungkinkannya dilakukan penenggelaman kapal yang terbukti melakukan penangkapan ikan tanpa izin (Mahmudah, 2015:79).

Salah satu daerah atau kepulauan yang pernah didatangi oleh kapal-kapal asing yang datang dari luar untuk mencuri hasil lautnya yaitu di wilayah perairan Kepulauan Riau, bahkan Menteri Kelautan dan Perikanan sudah menenggelamkan sebuah kapal asing tersebut. Kegiatan *illegal fishing* tersebut akan mengancam Kedaulatan Bangsa atau Negara di Indonesia khususnya yang sering terjadi di Kepulauan Riau. Semenjak itu hasil ikan yang ada di Kepulauan Riau semakin menurun, sehingga berdampak pada hasil pendapatan para nelayan di Kepulauan

Riau. Oleh karena itu perlu nya strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk mengatasi kapal-kapal asing yang masuk keperairan laut Kepulauan Riau, dan begitu juga banyak nya kasus tersebut dari tahun ketahun semakin meningkat. Seperti salah satu kasus *illegal fishing* yang ada di Kepulauan Riau dari tahun 2015-2017, seperti dibawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah kasus *illegal fishing* di Kepulauan Riau

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2015	21 Kasus
2	2016	28 Kasus
3	2017	32 Kasus

Sumber: Data dari PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) Kota Batam.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Pada semester pertama tahun 2017 ini, Satker Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam sudah menangkap 74 kapal ikan asing (KIA) yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Kepri. Bersama kapal-kapal yang diamankan itu, petugas juga menahan 106 nelayan asing untuk diproses lebih lanjut. Kepala Seksi Penindakan dan Pengawasan PSDKP Batam Bapak Syamsu menuturkan, berdasarkan data yang mereka rekap, setiap tahun angka pengungkapan *illegal fishing* selalu meningkat. Tahun 2015 yang hanya 21 kasus terjadi peningkatan di tahun 2016 menjadi 28 kasus, dan pada tahun 2017 terjadi kasus *illegal fishing* meningkat menjadi 32 kasus.

Tabel 1.2 Data Jumlah ABK Negara asing yang tertangkap dan asal kapal yang di tangkap dari Tahun 2012-2016 Di Satker PSDKP Batam

No	Tahun	Asal Kapal	Jumlah ABK dan Nahkoda yang Tertangkap	Alat Tangkap
1	2012	Malasya dan Vietnam	46 Orang	Pair Trawl dan Trawl
2	2013	Malasya, Vietnam dan Myanmar	170 Orang	Jaring Trawl, Pair Trawl, Gilnet, Long Line (Rawai), Purse seine, Trawl, Winch, Pukat Tunda, Peralatan Selam, Kompresor dan Selang.
3	2014	Thailand	33 Orang	Trawl
4	2015	Thailand, Vietnam dan Malasya	173 Orang	Gilnet, Trawl, Pair Trawl, Pancing Rawai
5	2016	Malasya, Vietnam, Thailand	211 Orang	Trawl, Pair Trawl, Hand Line, Rawai, Trawl Cadangan, Pancing Cumi.

Sumber: Data dari PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan) Kota Batam

Hal diatas menunjukkan bahwa para nelayan yang mencuri ikan berasal dari Negara Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Myanmar dan alat tangkap yang digunakan untuk mencuri ikan beraneka ragam, hal tersebut dapat mengancam dan merusak ekosistem bawah laut khususnya di Kepulauan Riau.

Wilayah Kepulauan Riau yang merupakan salah satu titik kepulauan terluar, pada tahun 2010-2011 mencapai kenaikan rata-rata tertinggi sebesar 109.03 dalam Produksi Tangkap Perikanan per Provinsi. Namun, jika mengamati kasus *illegal fishing* di Indonesia, maka jumlah kasus *illegal fishing* di Kepulauan Riau berbanding terbalik dengan produksi perikanan yang dihasilkan. Sesuai dengan yang diberitakan oleh beberapa media, berbagai penangkapan yang menyangkut *illegal fishing* masih sering terjadi di wilayah perbatasan. Kemudian, 2.408 pulau di Provinsi Kepulauan Riau, 19 pulau di antaranya berupa pulau-pulau kecil terluar yang tersebar dan berbatasan dengan 4 negara, Singapura, Malaysia, Kamboja, dan Vietnam. Sehingga faktor keamanan wilayah Kepulauan Riau dengan jalinan 19 pulau terluar sebagai “katup pengaman” menjadi penting untuk diperjuangkan (Utomo & Widayati, 2013).

Maraknya pelaku *illegal fishing* itu bukan semata karena lemahnya pengawasan dari aparat pemerintah terkait, tapi karena memang wilayah perairan Kepri yang kaya akan ikan menjadi daya tarik tersendiri yang membuat pelaku *illegal fishing* terus berdatangan. "Upaya pemerintah sudah cukup maksimal termasuk membentuk tim satgas 115 untuk memberantas kejahatan perikanan internasional, tapi itu tadi karena sumber daya laut kita yang menggiurkan mereka akan tetap nekad," ujar Syamsu. Untuk memerangi kejahatan perikanan internasional itu, peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama memantau dan mengawasi aktifitas *illegal* sangat penting (www.jawapos.com, 2017).

Penelitian ini jika dilihat dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Peneliti di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ISSN: 0251-286X. Volume 20 No. 2 Edisi April 2012, dengan judul penelitian “Baganisasi” Di Perairan Pulau Sebatik dalam Mengatasi *Illegal Fishing*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yang menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan analisa dihasilkan bahwa *illegal fishing* di wilayah perairan Pulau Sebatik disebabkan oleh: (a) rendahnya patroli laut; dan (b) dan lemahnya koordinasi aparat penegak hukum. Sementara kebijakan baganisasi berdampak positif, karena: (a) menghambat masuknya nelayan asing; (b) menunjukkan penguasaan perairan oleh Republik Indonesia; dan (c) kapal Tentara Angkatan Laut Negara lain segan masuk ke wilayah perairan Pulau Sebatik dan sekitarnya.

Berdasarkan perbandingan dari penelitian sebelumnya, penelitian ini akan berfokus dalam hal penanggulangan *illegal fishing* di Kepulauan Riau. Salah satu yang menjadi permasalahan dalam penaggulangan *illegal fishing* di Kepulauan Riau yaitu karena kurangnya patroli laut yang ada di kawasan perairan Kepulauan Riau. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di kemukakan sebelumnya untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“STRATEGI UPT PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (PSDKP) DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL FISHING DI KEPULAUAN RIAU”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan muncul dan akan diteliti oleh Penulis harus sesuai dengan latar belakang masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi UPT Pangkalan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam menanggulangi *illegal fishing* di Kepulauan Riau?
2. Apakah Faktor-Faktor penghambat dan pendukung dalam Strategi UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam menanggulangi *illegal fishing* di Kepulauan Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah permasalahan penelitian tersusun maka perlu diidentifikasi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui Strategi UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam menanggulangi *illegal fishing* di Kepulauan Riau.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung dalam strategi UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam menanggulangi *illegal fishing* di Kepulauan Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penulis melakukan penelitian ini untuk menambah pengetahuan, kajian dan pemahaman tentang strategi pangkalan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam menanggulangi *illegal fishing* di Kepulauan Riau. Selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan teori yang didapat dibangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya dengan yang terjadi dilapangan serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata (S-1).

b. Bagi Penulis

Untuk memenuhi syarat akademik dalam meraih gelar kesarjanaan dan bermanfaat untuk mengembangkan potensi yang ada selama maupun sesudah proses penelitian berlangsung, bahkan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah di peroleh selama perkuliahan pada tempat kerja mendatang.

c. Bagi Pihak Instansi PSDKP

Sebagai bahan masukan guna meningkatkan strategi dalam menanggulangi *illegal fishing* baik di tempat maupun dilapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Teori Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “*strategos*” yang berasal dari bahasa *stratos* yang berarti militer dengan *Ag* yang artinya memimpin strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menakhluikkan musuh dan memenangkan perang. Selain itu strategi juga dapat didefinisikan sebagai manajemen terampil dalam mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari pesaing dalam mencapai tujuan organisasi (Tampubolon, 2016:27). Ahmad A. Adnanputra, pakar humas dalam naskah workshop berjudul PR Strategy mengatakan bahwa strategi adalah bagian terpadu dari suatu rencana (Sari, 2012:26).

Pengertian strategi secara eksplisit yakni rencana tindakan yang menerangkan tentang alokasi sumber daya serta berbagai aktivitas untuk menghadapi lingkungan, memperoleh keunggulan bersaing dan mencapai tujuan perusahaan maupun organisasi (Daft, 2013:249). Strategi organisasi mencakup strategi dalam mencapai tujuan dan mengemban misi organisasi. Strategi yang terfokus akan mengarahkan dan menuntun para pegawai akan bekerja dengan berpusat pada mission driven (di dorong oleh misi) bukan sekadar pekerjaan rutin belaka. Pegawai yang bekerja berdasarkan misi akan berbeda kinerjanya dengan

pegawai yang bekerja sekadar untuk mendapatkan upah dan terjebak pada pekerjaan rutin sehari-hari (Istianda, 2014:8.36).

Selanjutnya, perlu diketahui pula komponen pembentuk strategi. Strategi dipengaruhi oleh Unsur-unsur tertentu yang berkaitan dengan lingkungan, kondisi, visi atau arah, tujuan dan sasaran, dari suatu pola yang menjadi dasar budaya perusahaan atau instansi bersangkutan.

1. Secara makro, lingkungan perusahaan atau lembaga tersebut akan dipengaruhi oleh unsur-unsur kebijakan umum, budaya yang dianut, system perekonomian dan teknologi yang dikuasai oleh organisasi bersangkutan.
2. Secara mikro, tergantung dari misi perusahaan, sumber-sumber dimiliki (sumber daya manusia dan sumber daya guna lainnya yang dikuasai) Sistem pengorganisasian, dan rencana atau program dalam jangka pendek atau jangka panjang,serta tujuan dan sasarannya yang hendak dicapai (Sari, 2012:28).

Menurut Chandler dan Learned (Sjafrizal, 2015:347) pengertian dari strategi itu sendiri berkembang dari suatu masa kemasa antara lain, yaitu:

1. Strategi sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan (institusi) dalam kaitan dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya.
2. Strategi sebagai alat untuk menciptakan keunggulan bersaing
3. Strategi sebagai alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing

4. Strategi merupakan tindakan bersifat senantiasa meningkat dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan pelanggan dimasa depan.

Sedangkan Strategi itu sendiri secara umum dapat pula dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu:

1. Strategi Manajemen (baik untuk perusahaan maupun para pengelola pembangunan) dapat dilakukan oleh pimpinan institusi bersangkutan dengan orientasi pengembangan secara makro (menyeluruh).
2. Strategi Investasi, merupakan strategi berorientasi pada pengembangan kegiatan investasi yang dilakukan dalam rangka pengembangan kegiatan usaha.
3. Strategi Bisnis atau pembangunan yang berorientasi pada pelaksanaan fungsi-fungsi kegiatan manajemen usaha atau pemerintahan (Sjafrizal, 2015:347).

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu alat yang digunakan oleh suatu institusi atau organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai serta dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan tujuan jangka yang panjang.

2.2 Pengertian *Illegal Fishing*

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan, memberi batasan pada istilah *illegal Fishing*, yaitu pengertian *illegal, unreported, dan unregulated (IUU) fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan Perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur

oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia (Mahmudah, 2015:80).

Illegal Fishing merupakan suatu permasalahan yang penting untuk dibahas karena memberikan dampak kerugian di sektor perekonomian suatu negara, terutama bagi negara-negara maritim. Oleh sebab itu pentingnya permasalahan *Illegal Fishing* ini diangkat, dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *Illegal Fishing* merupakan suatu permasalahan yang penting untuk dibahas karena memberikan dampak kerugian di sektor perekonomian suatu negara, terutama bagi negara-negara maritim.
- b. Selain memberikan dampak kerugian ekonomi, tindakan *Illegal Fishing* juga memberikan dampak sosial, politik dan lingkungan terhadap suatu negara.
- c. Kurang jelasnya peraturan Internasional yang mengatur mengenai upaya yang dilakukan oleh suatu negara apabila terjadi *Illegal Fishing* di wilayah kedaulatannya.
- d. Upaya yang diambil suatu negara dalam menangani kasus *Illegal Fishing* berbeda antara negara satu dengan negara lainnya, sehingga hal ini memicu ketegangan politis antar negara yang berkaitan (Almuzzamil, 2015).

Hal ini merujuk pada pengertian *illegal fishing* tersebut, secara umum dapat diidentifikasi menjadi empat golongan yang merupakan *illegal fishing* yang umum terjadi di Indonesia, yaitu:

- a. Penangkapan ikan tanpa izin;
- b. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;

- c. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang;
- d. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin (Mahmudah, 2015:81)

Unregulated fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang:

- a. Tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional.
- b. Dilakukan diarea yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar atau tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut (Mahmudah, 2015:82).

Kegiatan *unreported fishing* yaitu umum terjadi di Indonesia:

- a. Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan,
- b. Penangkapan ikan yang langsung dibawa kenegara lain

Unregulated fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dalam hal ini kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab Negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional (Mahmudah, 2015:82).

Kegiatan *unregulated fishing* di perairan Indonesia, antara lain masih belum diatur:

- a. Mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada,
- b. Wilayah perairan yang diperbolehkan dan dilarang,
- c. Pengaturan aktivitas *sport fishing* ,kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang (Mahmudah, 2015:82-83).

Berbagai bentuk kejahatan *illegal fishing* yang diidentifikasi dalam UU No. 45 tahun 2009 atas perubahan UU No.31 tahun 2004 tentang perikanan, dicantumkan beberapa pelaku terhadap tindak kejahatan maupun pelanggaran tersebut. Para pelakunya antara lain:

1. Setiap orang
2. Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan
3. Ahli penangkapan ikan
4. Anak buah kapal
5. Pemilik kapal perikanan
6. Pemilik perusahaan perikanan
7. Penanggung jawab perusahaan perikanan
8. Operator kapal perikanan
9. Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan
10. Kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan

11. Penanggung jawab pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

A. Kerugian Akibat *Illegal Fishing*

Kerugian yang ditimbulkan oleh *illegal fishing* tidak hanya sekadar dihitung berdasarkan nilai ikan yang dicuri, tetapi memiliki dampak yang cukup luas antara lain sebagai berikut:

1. Subsidi BBM dinikmati oleh kapal-kapal yang tidak berhak
2. Pengurangan penerimaan Negara bukan pajak
3. Peluang kerja nelayan Indonesia (lokal) berkurang, karena kapal-kapal *illegal* adalah kapal-kapal asing yang menggunakan ABK asing.
4. Hasil tangkapan umumnya dibawa langsung keluar negeri (Negara asal kapal), sehingga mengakibatkan:
 - a. Hilangnya sebagian devisa Negara
 - b. Berkurangnya peluang nilai tambah dari industri pengolahan
5. Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan karena hasil tangkapan tidak terdeteksi, baik jenis, ukuran maupun jumlahnya
6. Merusak citra Indonesia pada kancah internasional karena *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing berbendera Indonesia maupun kapal milik warga Negara Indonesia. Hal ini juga berdampak ancaman embargo terhadap hasil perikanan Indonesia yang dipasarkan diluar negeri.

B. Kategori *Illegal Fishing*

Secara spesifik kegiatan *Illegal fishing* dikategorikan kedalam 3 kelompok, yaitu:

1. Kegiatan perikanan melanggar hukum
2. Kegiatan perikanan tidak dilaporkan
3. Kegiatan perikanan tidak diatur

2.3 Analisis SWOT

Analisis SWOT pada dasarnya merupakan teknik identifikasi berbagai faktor dan unsur penentu pembangunan suatu institusi secara sistematis. Teknik analisis SWOT bertujuan untuk melakukan evaluasi kondisi lingkup kegiatan bersangkutan yang selanjutnya dapat pula digunakan untuk merumuskan strategi pembangunan institusi yang lebih tepat sesuai dengan kondisi dan potensi institusi bersangkutan. Dalam penerapannya, institusi yang dimaksud disini dapat berbentuk perusahaan atau dinas dan instansi pemerintah. Analisis SWOT ini didasarkan pada kondisi umum institusi bersangkutan baik yang bersifat internal maupun eksternal guna mencapai tujuan serta visi dan misi yang telah ditetapkan semula oleh para pemangku kepentingan (Sjafrizal, 2015:246).

Kekuatan utama analisis SWOT adalah karena teknik ini dapat melakukan evaluasi secara lebih tajam dan terarah tentang kondisi institusi atau daerah bersangkutan. Analisis SWOT merupakan salah satu instrument analisis yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor sistematis dalam merumuskan strategi suatu organisasi. Dalam melakukan penelitian ini adapun analisis yang digunakan dalam strategi yakni Analisis SWOT (*Strength,*

Weaknesses, Opportunities, Threat atau Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman). Keempat unsur ini merupakan aspek penting yang perlu dibahas untuk mengetahui kekuatan-kelemahan, peluang-ancaman yang dihadapi oleh suatu institusi atau organisasi untuk menjadi dasar bagi institusi atau organisasi dalam menetapkan strateginya. Dalam penelitian ini digunakan analisis SWOT yang menyatakan bahwa analisis SWOT diartikan sebagai akronim dari kata-kata *streghts* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman) adapun penjelasannya yaitu:

a. Faktor Berupa Kekuatan

Kekuatan pada dasarnya merupakan kelebihan yang dimiliki oleh suatu institusi atau organisasi. Kekuatan yang dimiliki oleh suatu organisasi yaitu antara lain kompetensi khusus yang terdapat dalam suatu organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan kompetitif oleh unit usaha di pasaran. Dikatakan demikian karena suatu organisasi atau institusi memiliki sumberdaya, keterampilan, produk andalan dan sebagainya yang membuatnya lebih kuat dari para pesaing dalam memuaskan kebutuhan pasar yang sudah dan direncanakan akan dilayani oleh satuan usaha yang bersangkutan.

b. Faktor Kelemahan

Keterbatasan atau kekurangan yang dimiliki oleh suatu daerah atau institusi tertentu dibandingkan dengan daerah atau institusi lainnya. Sama halnya dengan unsur kekuatan, analisis tentang kelemahan ini akan menjadi lebih

konkret dan meyakinkan bilamana dapat didukung oleh data dan informasi yang bersifat kuantitatif dan terukur.

c. Faktor Peluang

Sebagai kesempatan dan kemungkinan yang tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses pembangunan daerah atau institusi bersangkutan. Bahwa peluang ini adalah unsur yang datang dari luar (eksternal) baik dari segi ekonomi, sosial, kebijakan, dan aturan pemerintah atau karena adanya perubahan teknologi baru.

d. Faktor Ancaman

Suatu kondisi atau permasalahan yang datang dari luar dan dapat menimbulkan kesulitan, kendala atau tantangan yang cukup serius bagi suatu daerah atau institusi tersebut. Ancaman tersebut dapat muncul sebagai akibat kemajuan dan perubahan kondisi sosial ekonomi, perubahan kebijakan dan aturan atau karena terjadinya perubahan pandangan dan kemajuan teknologi atau situasi ketertiban dan keamanan yang membahayakan proses pembangunan. (Sjafrizal, 2015:247-248)

Serangkaian kekuatan analisis SWOT adalah justru terletak pada pertumbuhannya mencapai taraf analisa yang mendalam, terfokus pada sasaran, serta secara sistematis membedah lingkungan internal maupun eksternal keorganisasian. Agar sanggup mewujudkan pencapaian tersebut dan untuk mampu memperoleh masukan yang berharga bagi proses strategi pada suatu organisasi.

Walaupun teknik analisis SWOT ini cukup populer, namun demikian tidak dapat disangkal bahwa teknik ini juga mempunyai beberapa kelemahan dan

keterbatasan tertentu sehingga penerapannya dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dilakukan secara hati-hati. Kelemahan dan keterbatasan tersebut antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tingkat Subjektivitas Cukup Tinggi

Kelemahan pertama yang terdapat dalam analisis SWOT adalah cukup tingginya tingkat subjektivitas perencana dalam melakukan analisis. Hal ini terutama sangat dirasakan dalam menentukan unsur-unsur analisis SWOT seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Karena itu untuk meningkatkan objektivitas dari analisis SWOT ini sebaiknya analisis tersebut didukung juga dengan data-data kuantitatif terutama dalam menentukan unsur kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

2. Belum Terkait Langsung Dengan Penganggaran

Sebagaimana dijelaskan dari sejak awal sampai dengan bagian terakhir dari bab ini, ternyata teknik analisis SWOT baru dapat menghasilkan analisis kondisi objektif institusi secara tajam dan perumusan strategi pembangunan sesuai dengan kondisi objektif institusi dan daerah bersangkutan. Namun demikian, kelemahannya adalah bahwa teknik analisis SWOT ini belum dapat dilakukan secara terkait dan sistematis dengan perumusan anggaran yang diperlukan dalam mewujudkan strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang telah dirumuskan. Teknik analisis yang juga menggunakan analisis SWOT tetapi terkait langsung dengan aspek penganggaran adalah teknik *balance score-card* sebagaimana diuraikan oleh Mulyadi (Sjafrizal, 2015:259).

Teknik analisa faktor internal dan eksternal yang dilakukan dengan analisis dan evaluasi untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan serta mengkaji peluang dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan suatu misi. Kondisi lingkungan internal terutama menyangkut dengan kekuatan dan kelemahan institusi bersangkutan sedangkan kondisi lingkungan eksternal menyangkut dengan peluang dan ancaman yang dapat datang dari luar. Kemudian untuk memetakan isu atau faktor strategi digunakan analisis SWOT dalam bentuk matrik sebagai berikut:

Tabel 2.1 Matrik Analisis SWOT untuk Perumusan Strategi

Internal Eksternal	Strengths (S) Daftar semua kekuatan yang dimiliki.	Weaknesses (W) Daftar semua kelemahan yang dimiliki.
Opportunities (O) Daftar semua peluang yang dapat diidentifikasi	Strategi (SO) Gunakan semua kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada.	Strategi (WO) Atasi semua kelemahan dengan memanfaatkan semua peluang yang ada.
Threat (T) Identifikasi Ancaman	Strategi (ST) Gunakan semua kekuatan untuk menghindar dari semua ancaman.	Strategi (WT) Tekan semua kelemahan dan cegah semua ancaman.

(Sumber:Fahmi, 2015:265)

Dikutip dalam (Fahmi, 2015:265) Beberapa strategi yang diperoleh dari teknik Analisis SWOT sebagai berikut:

- a. Strategi SO (*Strength-Opportunities*) Memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh institusi untuk merebut peluang/menentukan kombinasi kekuatan dan

kesempatan yang bisa memanfaatkan kekuatan untuk menggunakan peluang sebaik-baiknya.

- b. Strategi WO (*Weakness-Opportunities*) Mengurangi kelemahan yang terdapat di institusi untuk merebut peluang di lingkungan luar dan memanfaatkan peluang yang menguntungkan.
- c. Strategi ST (*Strength-Threat*) Menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh institusi untuk menghilangkan ancaman dari luar atau mengatasi ancaman.
- d. Strategi WT (*Weakness-Threat*) Mengatasi kelemahan yang terdapat di institusi untuk meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian dilakukan oleh Chairun Nasirin, dengan judul Kontroversi Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia, P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875, Volume 12, Nomor 1, Pencurian sumber daya ikan di laut Indonesia telah menimbulkan kerugian besar sektor perikanan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengambil kebijakan tegas untuk memberantas *illegal fishing* melalui tindakan penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas implementasi kebijakan penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing* dan reaksi lingkungan yang timbul akibat kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan kebijakan penenggelaman kapal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan model top down yang ditandai

oleh kepastian peraturan, sistem komando yang kuat, pola instruksional dan koordinasi yang efektif, dukungan anggaran, dan dukungan birokrasi yang tangguh. Implementasi kebijakan ini juga telah menimbulkan reaksi lingkungan kebijakan yang keras berupa protes dari negara-negara tempat asal kapal-kapal yang ditenggelamkan. Secara empiris, hasil penelitian dapat membantu memperbaiki implementasi kebijakan pemberantasan *illegal fishing* dengan tindakan penenggelaman kapal, khususnya pada aspek pengelolaan reaksi lingkungan kebijakan agar dikemudian hari dapat lebih kondusif dan mendukung implementasi kebijakan (Nasirin & Hermawan, 2017)

Fakultas Hukum Universitas Lampung, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, ISSN 1978-5186, dengan Judul “Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (*Illegal Fishing*) Oleh Kapal Ikan Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia” Tulisan ini ingin mengkaji bagaimana kewenangan Indonesia dalam menanggulangi *illegal fishing* di wilayah ZEEI berdasar KHL 1982. Selain itu dalam tulisan ini juga ingin dikaji bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap tindak *illegal fishing* ini. Data dalam tulisan ini dicari dengan cara melakukan studi kepustakaan, artinya dengan cara mempelajari buku-buku, naskah-naskah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas (Aida, 2012). Data yang didapat kemudian dikumpulkan lalu disistematisasi. Data yang sudah disistematisasi itu kemudian dijelaskan untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Hasil yang didapat dari pembahasan dalam tulisan ini adalah: Indonesia berdasar KHL 1982 mempunyai kewenangan yang tegas dalam menindak pelaku

illegal fishing, namun dalam pelaksanaan penanggulangan *illegal fishing* di wilayah ZEE masih mengalami beberapa hambatan.

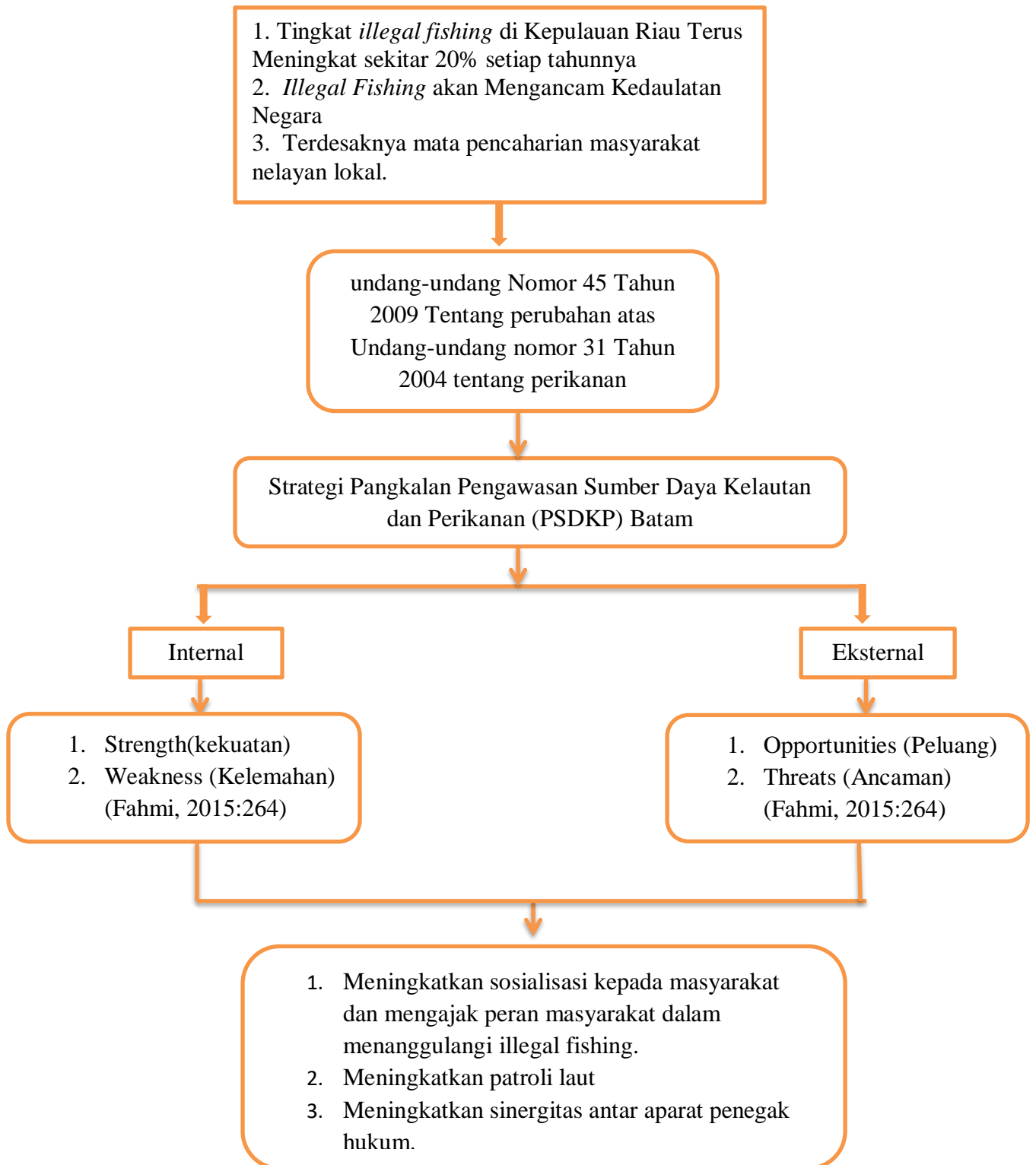
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ISSN: 0251-286X. Volume 20 No. 2 Edisi April 2012, dengan judul penelitian “Baganisasi” Di Perairan Pulau Sebatik Dalam Mengatasi *Illegal Fishing*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yang menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan analisa dihasilkan bahwa *illegal fishing* di wilayah perairan Pulau Sebatik disebabkan oleh: (a) rendahnya patroli laut; dan (b) dan lemahnya koordinasi aparat penegak hukum. Sementara kebijakan baganisasi berdampak positif, karena: (a) menghambat masuknya nelayan asing; (b) menunjukkan penguasaan perairan oleh Republik Indonesia; dan (c) kapal Tentara Angkatan Laut Negara lain segan masuk ke wilayah perairan Pulau Sebatik dan sekitarnya (Solihin et al., 2012)

Jurnal Logika, Vol XVII, No 2, Agustus 2016, ISSN: 1978-2560, dengan judul Penelitian Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*) Di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual, melalui rentetan penulisan induktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pihak- pihak yang berwenang dalam pemberantasan Tindak Pidana *Illegal Fishing* dan bagaimana politik hukum dalam penegakan hukum pidana *illegal fishing* (Pidana, Illegal, & Di, 2016).

Penelitian dilakukan oleh T. Muhammad Almuzzamil, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Riau Program

Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau. Dengan judul Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi *Illegal Fishing* Pada Tahun 2014-2015. Dengan Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode analisis kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literature yang dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder dalam hal ini diwakili oleh informasi-informasi dari literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti, dengan pertimbangan pengumpulan data dalam penelitian ini secara kualitatif didasarkan pada penelitian kepustakaan yang meliputi buku, jural yang relevan, surat kabar dan internet. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara holistic dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Almuzzamil, 2015).

2.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: hasil olahan peneliti 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian Kualitatif. Menurut (Creswell, 2016:247) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dimana peneliti sangat tergantung terhadap informasi dari objek atau partisipan pada ruang lingkup yang luas, pertanyaan yang bersifat umum, pengumpulan data yang sebagian besar terdiri dari kata-kata atau teks dari partisipan, menjelaskan dan melakukan analisis terhadap kata-kata dan melakukan penelitian secara subjektif. Menurut (Creswell, 2016:248) para peneliti kualitatif biasanya memilih mengumpulkan data dari beragam sumber seperti wawancara, observasi, dokumentasi, informasi audiovisual ketimbang bertumpu pada satu sumber data saja.

3.2 Fokus Penelitian

Penggunaan fokus penelitian dalam penelitian kualitatif yaitu supaya peneliti lebih fokus terhadap masalah yang ada sehingga tidak meluas. Dalam penggunaan penelitian skripsi ini peneliti berfokus pada strategi pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam menanggulangi illegal fishing di Kepulauan Riau. Agar tidak meluas maka peneliti berfokus pada pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Tersebut Dalam Menanggulangi Illegal Fishing. Dalam penggunaan penelitian ini peneliti

menggunakan teori strategi yaitu analisis SWOT yang dikembangkan oleh Sjafrizal dimana dalam penggunaan analisis SWOT terdiri dari *Strenght* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman)

3.3 Sumber Data

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yakni Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam dan POL AIR Sekupang. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari narasumber, tetapi dari pihak ketiga.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data bergerak dari data empiris dalam rangka membangun teori. Proses pengumpulan data ini dijelaskan Nasution (Sugiyono, 2016 : 222) meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

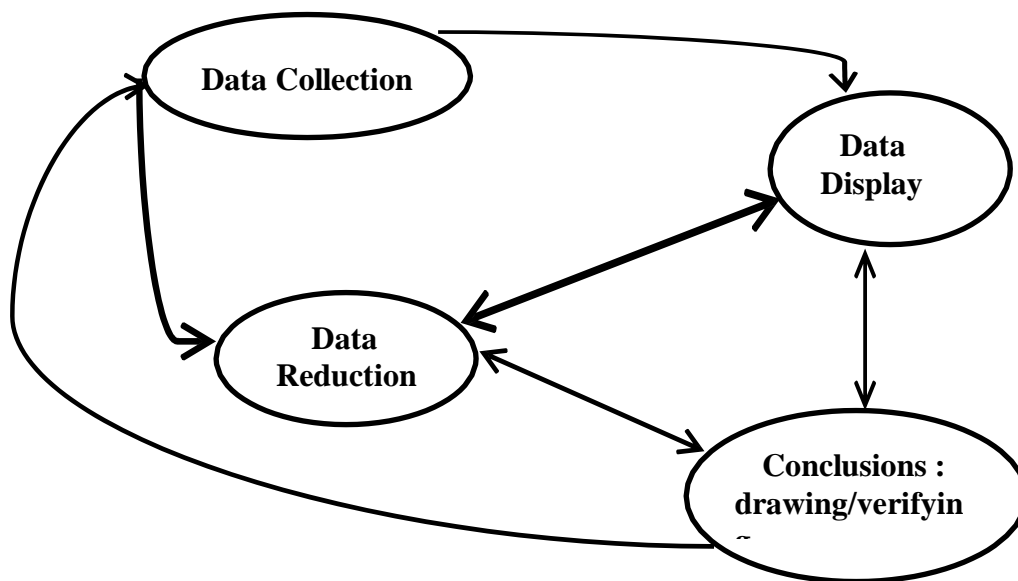
- a. Memesuki lokasi penelitian(getting in)
- b. Berada dilokasi penelitian (getting along)
- c. Pengumpulan data (logging data). Ada tiga macam teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:
 1. Wawancara mendalam yang dilakukan untuk mendapat gambaran dan memperoleh informasi yang dibutuhkan.
 2. Dokumentasi yang digunakan untuk menghimpun data yang bersumber dari arsip atau dokumen penting lainnya yang dianggap perlu.

3. Pengamatan (Observasi)

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan. Ketika wawancara sedang berlangsung misalnya peneliti dapat menganalisis wawancara yang dikumpulkan sebelumnya, menuliskan memo yang pada akhirnya dimasukkan sebagai narasi dalam laporan akhir, dan menyusun struktur laporan akhir.

Teknik Analisis Data menurut Bogdan (Sugiyono, 2016:244) yaitu analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Menurut *Miles and Huberman* (Sugiyono, 2016:246) Mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Selanjutnya model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 3.1 komponen dalam analisis data (*interactive model*)
 Sumber: Sugiyono 2016:246

Aktivitas dalam analisis data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum , memilih hal-hal pokok , memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.

2. Penyajian data

Penyajian data dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dalam penelitian

3. Verifikasi atau penyimpulan data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya.

3.6 Keabsahan Data

Salah satu cara penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi peneliti, metode, teori dan sumber data. Adapun menurut (Sugiyono, 2016:270) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Uji kredibilitas/kepercayaan terhadap data penelitian antara lain dengan:
 - a. Perpanjangan pengamatan dengan artian peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru
 - b. Menggunakan bahan referensi, hasil pengamatan yang di dukung dengan gambar dan foto
 - c. Triangulasi, teknik pengumpulan data dan waktu
2. Uji Transferability
Dalam menyusun laporan peneliti harus memberikan uraian yang jelas dan sistematis atas hasil penelitian tersebut.
3. Pengujian Depenability
Audit terhadap keseluruhan proses penelitian
4. Pengujian Konfirmability
Menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan.

3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

A. Lokasi Penelitian

Lokasi tempat penelitian adalah di Jln.Trans Bareleng Jembatan II Pulau Nipah Kel. Setokok Kec. Bulang Kota Batam. Alasan pemilihan lokasi penelitian

ini adalah sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai Strategi UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Dalam Menanggulangi *Illegal Fishing* Di Kepulauan Riau. Dan peneliti juga melakukan penelitian di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kepri, lokasi tersebut dipilih karena memiliki semua aspek pendukung agar penelitian dapat dilakukan dengan baik.

B. Jadwal Penelitian

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian 2018

Kegiatan	Bulan																			
	Maret 2018				April 2018				Mei 2018				Juni 2018				Juli 2018			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan Perencanaan	■	■																		
Studi Pustaka			■	■																
Penyusunan Proposal					■	■	■	■												
Pengumpulan data									■	■	■	■								
Pengelolaan data													■	■	■	■				
Analisis Data																	■	■		
Penyusunan laporan																			■	■